

# DOKUMEN LPPD 2024

---

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KASUBAG PROGRAM  
DISPARBUD 2024

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah atas terselesaikannya kewajiban kami dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Laporan tahunan ini disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam hal ini capaian kinerja penyelenggaraan Pariwisata dan Kebudayaan yang dibebankan pada OPD kami.

Periode ini merupakan tahun kedua Renstra 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang targetnya sudah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Selain itu, periode ini juga bergabungnya kembali Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata yang sempat terpisah selama 1 periode pemerintahan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri atas capaian kinerja makro Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata dan Kebudayaan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

LPPD ini disusun menggunakan format sistematika yang telah ditentukan dari tim kabupaten sehingga setiap OPD memiliki format yang sama antara satu dengan lainnya. Terkait hal tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak memiliki tugas pembantuan dan penugasan sehingga bab tersebut dihapus dalam sistematika.

Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini terutama penyiapan informasi terkait permintaan data pada laporan ini.

Benteng, 22 Maret 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang;	
1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; .....	1
1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD; .....	2
1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak , dan Data Jabatan Struktural yang Belum Terisi .....	4
1.5. Inovasi .....	5
1.6. Penghargaan .....	5
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output .....	6
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome .....	13
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	16

## **DAFTAR TABEL dan GAMBAR**

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan .....	2
Tabel 1.2. Klasifikasi pegawai menurut eselon .....	4
Tabel 1.3. Klasifikasi pegawai fungsional .....	4
Tabel 2.1. Daftar objek pemajuan kebudayaan .....	6
Tabel 2.2. Daftar SDM, lembaga dan pranata .....	6
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata .....	8
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) Urusan Kebudayaan dan Pariwisata .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional kepala daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban. LPPD juga merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan LPPD:

- Memberikan informasi kinerja penyelenggaraan APBDes kepada masyarakat dan BPD
- Memberikan bahan evaluasi kepada bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan
- Memberikan dasar dan pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya
- Memberikan tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan
- Memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa dan sistem kinerja pemerintah
- Memberi kontribusi terhadap terciptanya tata pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan transparan

### 1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan pemerintahan Pilihan yaitu Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk ke dalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretaris dan 4 bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata,

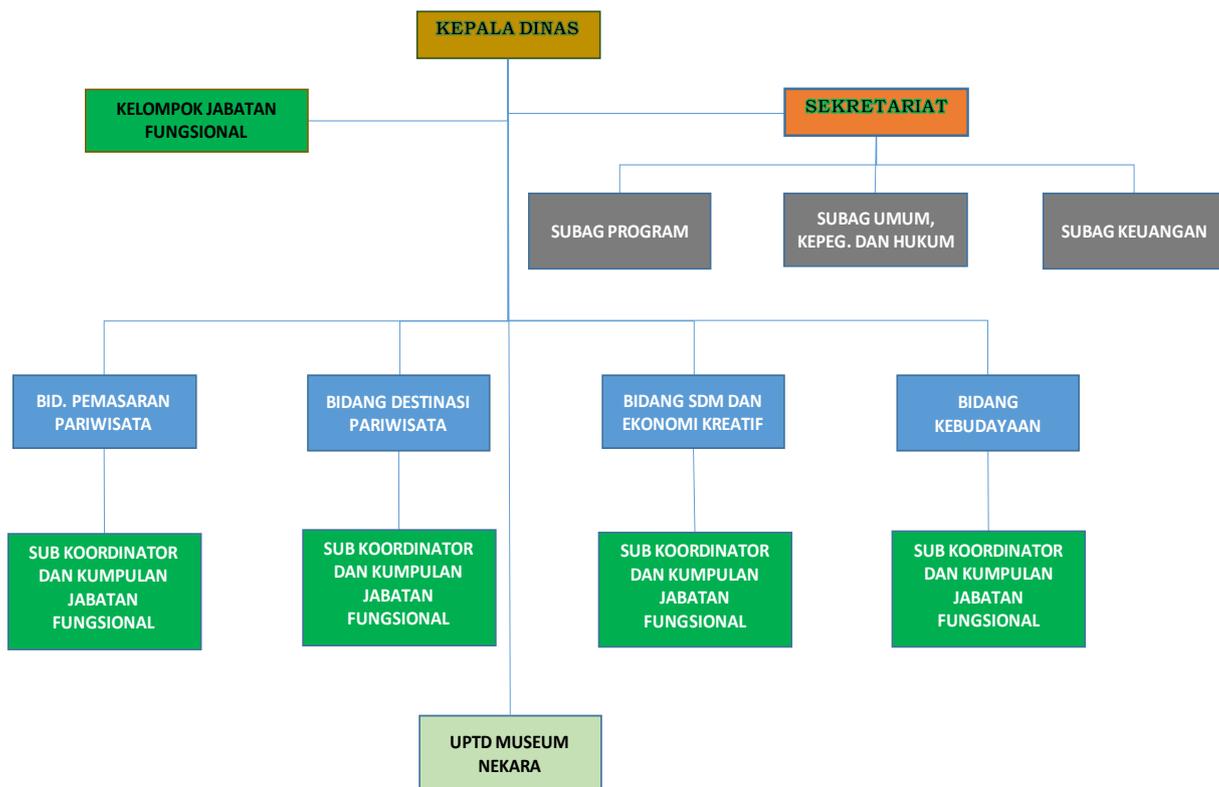
Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Kebudayaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 4, Benteng, call center : 0414 - 21726. Email : [Humas.Disparbudselayarkab@gmail.com](mailto:Humas.Disparbudselayarkab@gmail.com), website : [www.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id](http://www.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id), facebook : Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Youtube : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kepulauan Selayar dan Instagram : @disparselayar. Bangunan Kantor yang digunakan merupakan cagar budaya masa kolonial yang diregistrasi Nasional CB No. PO2015081700082 melalui Surat Keputusan Bupati No. 603/XII/Tahun 2018, tanggal 5 Desember 2018. Kantor ini pernah difungsikan sebagai kantor wakil KPN dan KPN tahun 1950 s/d 1956. Selanjutnya tahun 1960 dijadikan kantor Bupati Kepulauan Selayar, kemudian pada tahun 1985 dimanfaatkan sebagai museum dengan nama Museum Nekara oleh dinas P dan K, dan baru di tahun 1996 difungsikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai sekarang.

### 1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang kemudian di ubah lagi menjadi Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif dan Bidang Kebudayaan. Setiap bidang tersebut membawahi 3 (tiga) seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada gambar di bawah ini :

**Gambar.1. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - i. menyelenggarakan administrasi urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pariwisata dan kebudayaan;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
  - l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 1.4. Jumlah aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak, dan Data Jabatan Struktural yang belum terisi

Jumlah ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 37 orang, sudah termasuk 3 orang pegawai dari UPTD MUSEUM NEKARA dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Klasifikasi Pegawai Menurut Eselon**

<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Eselon II	1 orang
Eselon III	5 orang
Eselon IVa	3 orang
Eselon IVb	0 orang
Jabatan Fungsional	23 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>32 orang</b>

**Tabel 1.2**

**Klasifikasi Pegawai Fungsional**

<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Jabatan Fungsional tertentu	4 orang
Jabatan Fungsional Disetarakan	8 orang
Jabatan Fungsional Pelaksana	11 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>23 orang</b>

Jumlah tenaga PHL sebanyak 38 orang. Jabatan struktural yang belum terisi 0 orang.

1.5. Inovasi

Pada tahun 2024, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada Inovasi yang diajukan.

## 1.6. Penghargaan

Pada tahun 2024, penghargaan yang didapat baik dari kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari kabupaten lain, provinsi dan nasional :

- a. CNN Indonesia Awards 2024 kategori outstanding Sustainable Tourism Practice.
- b. Peringkat 3 atas Tata Kelola Keuangan Memadai pada Rapat gelar pengawasan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Stand favorit I pada acara Gebyar Wisata dan Produk Unggulan daerah 2024 Indotani Expo 2024.
- d. Juara VI Lomba kebersihan kantor dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke 53 tahun 2024.
- e. Juara I Lomba Mars Korpri dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke 53 tahun 2024.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK keluaran yang akan digunakan sebagai indikator output urusan Kebudayaan dan Pariwisata yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020. Capaian kinerja output Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

##### 2.1.1. Urusan Kebudayaan

Dalam Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan Kebudayaan memiliki 5 program dengan kegiatan dan sub kegiatan yang menyertainya. Namun dari anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut di tahun 2024 adalah :

- ✚ Rp. 180.000.000,- dari Anggaran DAU
- ✚ Rp. 700.000.000,- dari Anggaran DAK Non Fisik  
(khusus Untuk Museum)

Sehingga untuk melaksanakan urusan yang begitu luas, mulai dari pemajuan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan cagar budaya, pengelolaan sejarah daerah, hingga pengelolaan museum tidaklah cukup.

Pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Daftar Objek Pemajuan Kebudayaan

NO.	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	DIINVENTARIS	DIAMANKAN	DIPELIHARA	DISELAMATKAN	DIPUBLIKASIKAN	DISEBARLUASKAN	DIKAJI	DIKAYAKAN KERAGAMANNYA	DIMANFAATKAN
1.	ADAT ISTIADAT	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	RITUS	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TRADISI LISAN	Ya	-	-	-	Lomba tradisi lisan pau-pau to riolo dan lomba cerita rakyat	-	-	-	-
4.	PENGETAHUAN TRADISIONAL	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	TEKNOLOGI TRADISIONAL	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SENI	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BAHASA	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	PERMAINAN RAKYAT	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	OLAH RAGA TRADISIONAL	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	MANUSKRIP	Ya	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2. Daftar SDM, Lembaga & Pranata

NO.	URAIAN	DITINGKATKAN	DISERTIFIKASI	DISTANDARISASI	DITINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA
1.	SDM, LEMBAGA, PRANATA	-	-	-	-

Anggaran yang digunakan untuk Urusan Pariwisata (4 program dan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang menyertai) di luar Penunjang urusan pemerintahan (gaji dan anggaran sekretariat), sebagai berikut :

✚ Rp. 700.668.000,- dari anggaran DAU

✚ Rp. 350.000.000,- dari anggaran Insentif Fiskal

Lebih lengkapnya, Output Indikator Kinerja Kunci yang dicapai dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)**

**URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	<b>KEBUDAYAAN</b>						
	Terlestarikannya Cagar Budaya	421	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah OPK yang (diinventaris+ diamankan+dipelihara + diselamatkan+ dipublikasikan)	OPK diinventaris = OPK diamankan = OPK dipelihara = OPK diselamatkan = OPK dipublikasikan =	OPK diinventaris = 10 buah OPK diamankan = 0 OPK dipelihara = 0 OPK diselamatkan = 0 OPK dipublikasikan = 2	Disparbud bidang kebudayaan
		422	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) = 0	OPK disebarluaskan = OPK dikaji = OPK dikayakan keberagamannya =	OPK disebarluaskan = 0 OPK dikaji = 0 OPK dikayakan keberagamannya = 0	
		423	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan = 0	OPK dimanfaatkan :	OPK dimanfaatkan = 0	
		424	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	SDM ditingkatkan = SDM disertifikasi = Lembaga distandarisasi = Lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola = Pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola =	SDM ditingkatkan = 0 SDM disertifikasi = 0 Lembaga distandarisasi = 0 Lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola = 0 Pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola = 0	
		425	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian,	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	Jumlah CB ditetapkan = Jumlah CB	Jumlah CB ditetapkan = 0 Jumlah CB dihapuskan =	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		dihapuskan =	0		
		426 Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	Jumlah CB diselamatkan = Jumlah CB diamankan = Jumlah CB dizonasi = Jumlah CB dipelihara = Jumlah CB dipugar =	Jumlah CB diselamatkan = 0 Jumlah CB diamankan = 0 Jumlah CB dizonasi = 0 Jumlah CB dipelihara = 0 Jumlah CB dipugar = 0		
		427 Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	Jumlah CB diberi izin	Jumlah CB diberi izin = 0		
		428 Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Jumlah CB diteliti = Jumlah CB direvitalisasi = Jumlah CB diadaptasi =	Jumlah CB diteliti = 0 Jumlah CB direvitalisasi = 0 Jumlah CB diadaptasi = 0		
		429 Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Jumlah CB dimanfaatkan =	Jumlah CB dimanfaatkan = 0		
		430 Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (Dikembangkan) = 9.750 buah yang terdiri dari etnografika 45 buah, numismatika dan heraldika 7.501 buah, filologika 2 buah, keramologika 2.173 buah dan lain – lain terdiri dari 29 buah.	Etnografika = Numismatika dan heraldika = Filologika = Keramologika = Lain-lain =	Etnografika = 45 koleksi Numismatika dan heraldika = 7.501 koleksi Filologika = 2 koleksi Keramologika = 2.173 koleksi Lain-lain = 29 koleksi Total : 9.750 koleksi		
		431 Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung	Jumlah pengunjung = 5.367 orang (thn 2024)		
		432 Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Jumlah masyarakat yg berpartisipasi =	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi = 0		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			prasarana museum kabupaten/kota				
		433	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Jumlah tim pendaftaran CB =	Jumlah tim pendaftaran CB = 0	
		434	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Jumlah pembentukan tim ahli CB =	Jumlah pembentukan tim ahli CB = 0	
		435	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Jumlah ahli CB yang bersertifikat update =	Jumlah ahli CB yang bersertifikat update = 0	
		436	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	Jumlah SDM CB & Museum =	Jumlah SDM CB = 0 org Jumlah SDM Museum = 8 org	
		437	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya =	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya = 0	
		438	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	Jumlah sarpras. CB = Jmlh sarpras museum =	Jumlah sarpras. CB = 0 Jmlh sarpras museum = 46 unit	
		439	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum melibatkan masyarakat =	Jumlah kegiatan museum melibatkan masyarakat = 6 kegiatan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
2	<b>PARIWISATA</b>						
		463	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas	Jumlah entitas =	Jumlah entitas = 13	Bidang Destinasi Pariwisata
		464	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah infrastruktur dasar = Jumlah fasilitas umum = Jumlah fasilitas pariwisata =	Jumlah infrastruktur dasar = 6 macam Jumlah fasilitas umum = 16 Macam Jumlah fasilitas pariwisata = 15 macam	Bidang Destinasi Pariwisata
		465	Jumlah NIB di sektor pariwisata	Jumlah NIB per sub kegiatan	Jasa penyedia makan/ minum = Jasa penyedia akomodasi = Jasa perjalanan wisata = Jasa hiburan dan olah raga = Jasa MICE =	Jasa penyedia makan/ minum = 1 usaha Jasa penyedia akomodasi = 17 usaha Jasa perjalanan wisata = 1 usaha Jasa hiburan dan olah raga = 0 usaha Jasa MICE = 0 usaha Spa = 0 usaha Salon/tukang cukur = 0 usaha	Bidang Destinasi Pariwisata  2024
		466	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan	Rusia = Selandia Baru = Belgia = Malaysia = Denmark = Italia = Inggris = Perancis = AS = Jerman = Australia = Hungaria = Irlandia = Pakistan = China = Swiss = Belarusia = Belanda = Kostarika =	Rusia = 1 org Selandia Baru = 4 org Belgia = 3 org Malaysia = 10 org Denmark = 1 org Italia = 24 org Inggris = 111 org Perancis = 25 org AS = 7 org Jerman = 5 org Australia = 169 org Irlandia = 2 org Belarusia = 1 org Pakistan = 16 org China = 2 org Swiss = 3 org Belarusia = 1 org Belanda = 3 org Kostarika = 1 org	Bidang Pemasaran Pariwisata

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		467	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah	Jumlah event =	Jumlah event = 1	Bidang Pemasaran Pariwisata
		468	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri	Jumlah event =	Jumlah event = 0	Bidang Pemasaran Pariwisata
		469	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industry pariwisata berpartisipasi	Jumlah industry pariwisata =	Jumlah industry pariwisata = 0	Bidang SDM & EKRAF / Bidang pemasaran pariwisata
		470	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja bersertifikasi	Jumlah tenaga kerja bersertifikasi =	Jumlah tenaga kerja bersertifikasi = 0	Bidang SDM & EKRAF
		471	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah SDM yang mendapatkan diklat kepariwisataan	Jumlah SDM yg ikut pelatihan	Jumlah SDM yg ikut pelatihan = 20 org	Bidang SDM & EKRAF
		472	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah desa/ pokdarwis yang dibina	Jumlah pokdarwis yang dibina	Jumlah pokdarwis yang dibina = 18	Bidang SDM & EKRAF

## 2.2 Capaian Kinerja Urusan pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

Ada sedikit perubahan yang digunakan dalam perhitungan IKK outcome di Urusan Kebudayaan. Seperti perhitungan jumlah cagar budaya yang dilestarikan, dimana benda cagar budaya yang menjadi koleksi museum dijadikan 1 item sesuai dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel IKK outcome di bawah ini :

Tabel 2.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	<b>Kebudayaan</b>						
		83	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	Jmlh CB terdata= 38 data Jmlh CB dilestarikan = 17 data	44,74%	Bidang Kebudayaan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	<b>Pariwisata</b>						
		89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1})}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	Jumlah wisatawan 2024 = 394 Jumlah wisatawan 2023 = 163	$\frac{(394-163)}{163} \times 100\% = -141,71\%$	Bidang pemasaran pariwisata
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{Jumlah wisatawan tahun n-1})}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	Jumlah wisatawan 2024= 14101 Jumlah wisatawan 2023 = 16073	$\frac{((14101- 16073) /16073) \times 100\% = - 12,27\%$	
		91	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	Jumlah kamar terjual 2024 Jumlah kamar tersedia 2024	Jumlah kamar terjual 2024 = 4.904 kmr Jumlah kamar tersedia 2024 setahun = 112.911	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					kmr (5.565/133.365) x 100% = 4,3%		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Tahun 2024	0,24%	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Kontribusi PAD sektor Pariwisata/PAD Kabupaten	(2.860.547.861/ 81.837.235.139,54) X 100% = 3,50%	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari uraian di atas, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengelola 2 urusan yaitu urusan pilihan Pariwisata dan wajib Kebudayaan. Pada urusan pariwisata berkaitan dengan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, sdm pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari IKK output dan outcome disimpulkan bahwa di tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah kunjungan mancanegara dari 163 wisatawan di tahun 2023, menjadi 394 di tahun 2024. Selain itu peningkatan kunjungan wisatawan nusantara turun dari 16.073 wisatawan di tahun 2023 menjadi 14.101 wisatawan di tahun 2024. Ini membuktikan bahwa event yang dilaksanakan tidak menentukan kenaikan wisatawan, tetapi yang menjadi penentu kenaikan wisatawan adalah adalah kebutuhan wisatawan yang terpenuhi bila melakukan kunjungan ke suatu daerah yang diikat oleh situasi dan kondisi yang terjadi di dunia dan di negara tujuan.

Terkait urusan Kebudayaan, persentase cagar budaya yang lestarian mencapai 44,74 %. Hal ini dikarenakan rendahnya intervensi pemerintah dalam pembinaan dan pelestarian cagar budaya disebabkan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan yang lain. Ini menjadi *warning* bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berubahnya orientasi kehidupan masyarakat yang mulai meninggalkan hal-hal yang dianggap kuno dan tradisional.

Sebagai saran kedepannya, perlu memanfaatkan semua cagar budaya yang ada dan memperkenalkan pentingnya cagar budaya sebagai bukti sejarah dari nenek moyang masyarakat Selayar. Bukan cuma pencarian benda cagar budaya saja yang perlu digalakkan juga penulisan buku sejarah masyarakat Kepulauan Selayar serta gerakan cinta museum juga perlu dikembangkan sehingga generasi mendatang tidak kehilangan jejak dalam mendalami generasi terdahulunya.



